

AKOMODASI KULTURAL DALAM RESOLUSI KONFLIK BERNUANSAGA AGAMA DI INDONESIA

Zaenuddin Hudi Prasajo

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Indonesia
zaestain@yahoo.com

Mustaqim Pabbajah

Universitas Teknologi Yogyakarta
mustaqim_pabbajah@uty.ac.id

Abstract: Ethnic and religious diversity in Indonesia have become not only a wealth but in the same time also a threat to the country. They have also become the sources of cultural diversity as cultural assets that need attention. In fact, these cultural assets have potentials in the emergence of social and religious conflicts. This article suggests important findings carrying three main issues in looking at conflicts in the name of religion. With qualitative data analysis, the three main issues are collaborated. First, the conflict that took place in Indonesia tends to occur in three forms including; communal conflicts, sectarian conflicts and political installation conflicts. Second, conflict in the name of religion is triggered by several factors including lacking of understanding of the cultural, ethnic and religious diversities in Indonesia. Third, cultural accommodation by looking at the potential of local wisdom has been evidence to offer useful, needed alternatives in solving conflicts that occur in the community. This work recommends that it is necessary to deepen and disseminate all parties in empowering the potential of local culture in Indonesia.

Keyword: *Accomodation, Culture, Religion, Conflict Resolution*

Abstrak: Keragaman etnis dan agama di Indonesia merupakan kekayaan sekaligus sebagai ancaman bagi negara ini. Keragaman etnis dan agama menghasilkan keragaman budaya yang merupakan aset kultural serta perlu mendapatkan perhatian. Aset kultural tersebut berpotensi besar dalam kemunculan konflik sosial maupun agama. Artikel ini menawarkan temuan penting mengenai tiga isu utama dalam melihat konflik atas nama agama. Dengan analisis data kualitatif, ketiga isu utama tersebut dielaborasi. Pertama, konflik yang berlangsung di Indonesia cenderung diperlihatkan dalam tiga bentuk antara lain: konflik komunal, konflik sektarian, dan konflik eskalasi politik. Kedua, faktor konflik agama dipicu beberapa faktor yang meliputi masih minimnya pemahaman realitas keragaman suku, etnis, dan agama di Indonesia. Ketiga, akomodasi kultural dengan melihat potensi kearifan lokal telah mampu dijadikan sebagai perangkat penyelesaian permasalahan konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Rekomendasi artikel ini adalah diperlukan pendalaman dan sosialisasi semua pihak dalam memberdayakan potensi budaya lokal di Indonesia.

Keyword: *Akomodasi, Kultural, Agama, dan Resolusi Konflik*

Pendahuluan

Konflik yang selama ini terjadi, khususnya di Indonesia, telah mengakibatkan konstruksi nilai dalam kehidupan bersama yang telah dibangun di tengah masyarakat. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan slogan bangsa Indonesia sebagai bangsa multikultural yang dibangun atas kesadaran *bhinneka tunggal ika*. Sudah menjadi realitas bahwa bangsa Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya beragam dengan potensi konflik yang tinggi.¹ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dan pemahaman lintas budaya dengan pengembangan masyarakat Indonesia yang multikultur. Studi ini mengulas mengenai akomodasi kultural dalam resolusi konflik agama di Indonesia yang juga melibatkan unsur pendidikan yang merupakan salah satu sarana penentu dalam mengkonstruksi pemahaman masyarakat.² Sebagai

¹ Inayatul Ulya, "Pendidikan Islam Multikultural sebagai Resolusi Konflik Agama di Indonesia," *FIKRAH*, 2016, <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1663>; Philipus Tule, "Religious Conflicts and a Culture of Tolerance: Paving the Way for Reconciliation in Indonesia," *Antropologi Indonesia*, 2014, <https://doi.org/10.7454/ai.v0i63.3404>.

² Mas Wedan, "Pengertian Pendidikan dan Tujuan Pendidikan Secara Umum," Silabus, 2016.

mahluk sosial, manusia memiliki ragam perbedaan antara satu dengan yang lainnya, sehingga kebutuhan terhadap pendidikan pun secara praktis diperlukan keragaman bentuk dan pendekatannya, salah satunya melalui pendidikan multikultural. SETARA Institute pada tahun 2018³ mencatat bahwa terdapat 109 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) dengan 136 tindakan. Peristiwa pelanggaran KBB tersebut tersebar di 20 provinsi di Indonesia, dan menurut laporan itu, konflik atas nama agama mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan kondisi tersebut, diperlukan respon semua pihak untuk menemukan resolusi konflik yang efektif di tengah latar belakang budaya dan agama yang berbeda.

Sejauh ini studi yang sudah ada terkait resolusi konflik agama telah banyak dilakukan para peneliti. Studi tentang konflik dan agama setidaknya memperlihatkan pada tiga perspektif. Pertama, problematika konflik agama yang sedang berlangsung di tengah masyarakat.⁴ Kedua, pendekatan

³ SETARA Institute, "Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran Tahun 2018," 2018.

⁴ St. Aisyah BM, "Konflik Sosial dalam Hubungan Antarumat Beragama," *Jurnal Dakwah Tabligh*, 2014,

pemahaman toleransi dalam pemecahan konflik agama⁵ berkaitan dengan isu pluralisme dalam pemecahan konflik agama.⁶

<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdt.v15i2.348>; Firdaus M Yunus, "Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya," *Substantia*, 2014; Agus Fauzi, "Agama, Pancasila dan Konflik Sosial di Indonesia," *E-Journal Lentera, Hukum*, 2017, <https://doi.org/10.19184/ejhl.v4i2.5295>; Retnowati Retnowati, "Agama, Konflik, dan Integrasi Sosial (Integrasi Sosial Pascakonflik, Situbondo)," *Analisa*, 2014, <https://doi.org/10.18784/analisa.v21i02.14>.

⁵ Khotimah Khotimah, "Toleransi Beragama," *Jurnal Ushuluddin*, 2013, <https://doi.org/10.24014/JUSH.V20I2.928>; Rina Hermawati, Caroline Paskarina, and Nunung Runiawati, "Toleransi Antarumat Beragama di Kota Bandung," *Indonesian Journal of Anthropology*, 2017, <https://doi.org/10.24198/umbara.v1i2.10341>; Abu Bakar, "Konsep dan Kebebasan Beragama," *Toleransi*, 2015, <https://doi.org/10.24014/trs.v7i2.1426>; Suryan A Jamrah, "Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam," *Jurnal Ushuluddin*, 2015; Suryan Suryan, "Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam," *Jurnal Ushuluddin*, 2017, <https://doi.org/10.24014/jush.v23i2.1201>; Tule, "Religious Conflicts and a Culture of Tolerance: Paving the Way for Reconciliation in Indonesia."

⁶ Casram Casram, "Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 2016, <https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.588>; Zulfa Jamalie, "Pluralisme, Toleransi, Pendidikan Multikultural dan Kerukunan

Ketiga, pendekatan budaya dan kearifan lokal dalam resolusi konflik agama⁷ menyarankan pada pemecahan permasalahan konflik dengan pendidikan multikultural.⁸ Oleh karena itu, studi ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali pentingnya akomodasi kultural dalam penanganan konflik dalam konteks masyarakat yang beragam budaya, etnis, dan agama seperti di Indonesia.

Studi ini merupakan respon atas studi sebelumnya dengan melengkapi kajian yang telah ada terkait resolusi konflik dan agama di Indonesia dengan penekanan studi pada akomodasi kultural. Sejalan dengan itu, tiga pertanyaan dapat

Umat Beragama," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 2012.

⁷ Wasisto Raharjo Jati, "Kearifan Lokal sebagai Resolusi Konflik Keagamaan," *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 2013, <https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.2.251>; Aulia Aziza, "Relasi Agama dan Budaya," *ALHADHARAH*, 2017, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v15i30.1204>.

⁸ Arif Unwanullah, "Tranformasi Pendidikan untuk Mengatasi Konflik Masyarakat dalam Perspektif Multikultural," *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2013, <https://doi.org/10.21831/jppfa.v1i1.1050>; Ulya, "Pendidikan Islam Multikultural sebagai Resolusi Kondlik Agama di Indonesia"

dirumuskan; (a) Bagaimana bentuk konflik agama yang sedang berlangsung di Indonesia? (b) Faktor apa yang melatarbelakangi lahirnya konflik atas nama agama? dan (c) Bagaimana akomodasi kultural mampu menjadi tawaran praktis dalam resolusi konflik atas nama agama di Indonesia? Dengan terjawabnya tiga pertanyaan yang diajukan tersebut, diharapkan mampu menjadi alternatif dalam penanganan konflik agama yang dijadikan fokus pembahasan dalam studi ini.

Asumsi yang dibangun dalam studi ini didasarkan pada tiga aspek. Pertama, konflik agama yang sedang berlangsung selama ini tidak dapat dilepaskan dari faktor keragaman budaya yang saling bersinergi dan bersinggungan. Kedua, konflik atas nama agama yang terjadi diakibatkan masih lemahnya peran lembaga budaya dan pemahaman terhadap keragaman kebudayaan masyarakat, sehingga mudah terprovokasi atas nama perbedaan etnis, ras, dan agama. Ketiga, konflik agama dapat diselesaikan melalui pendekatan kultural, simbol budaya, dan aktor budaya. Dengan kata lain, akomodasi kultural diperlukan dalam penanganan konflik yang sering terjadi di tengah masyarakat. Dengan terakomodasinya potensi kultural yang dimiliki setiap wilayah diharapkan mampu menjadi resolusi atas permasalahan konflik,

bahkan dapat menghindarkan masyarakat dari gesekan dini akibat perbedaan.

Akomodasi Kultural

Untuk melihat fenomena yang berkembang mengenai konflik agama tersebut dan mengkaji peluang alternatif dalam menyikapinya, tulisan ini memberikan tawaran untuk meninjau literatur mengenai akomodasi kultural yang memiliki akar budaya dalam masyarakat Indonesia. Akomodasi kultural mengajak berbagai elemen masyarakat untuk melihat ke dalam diri masyarakat dengan mengedepankan kesamaan-kesamaan di samping perbedaan yang dimiliki. Selain itu, akomodasi kultural memberikan ruang kepada setiap masyarakat dengan berbagai latar belakang agamanya untuk kembali mengenal diri dan budayanya sehingga dapat menjadi modal dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul, termasuk persoalan yang bernuansa agama. Lebih khusus lagi, akomodasi kultural pada isu-isu migrasi telah dipandang mampu menjadi jalan keluar untuk membantu memecahkan konflik yang melibatkan kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda dan bahkan antara pendatang dan penduduk lokal.

Bagi banyak orang, kerumitan pergerakan lintas nilai, budaya, bahasa, pengetahuan, dan lokasi fisik menghasilkan keadaan yang tidak terduga dan sulit, terkait subjektivitas dan identitas.⁹ Pergerakan yang dimaksud dalam konteks ini adalah kasus imigran yang berpindah dalam suatu teritorial baru. Namun, pendatang memerlukan himpunan relevan dengan pengalaman migrasi di mana identitas (tubuh, tindakan, hasrat) diciptakan kembali dan dinegosiasikan ulang¹⁰ agar bisa diterima baik oleh penduduk lokal. Argumen ini ditangguhkan Kong & Woods¹¹ bahwa migrasi menghasilkan orang-orang yang—dengan berbagai cara, dan beragam derajat—berbeda satu sama lain yang hidup dalam kedekatan fisik. Hal ini menyebabkan bercampurnya

⁹ Gaile S. Cannella and Mary Esther Soto Huerta, "Introduction: Becoming with Hybrid Bodies—Immigration, Public Policy, and the In-Between," *Critical Methodologies* 19, no. 3 (2019): 147–151, <https://doi.org/doi:10.1177/1532708618817903>.

¹⁰ Geoffrey Hughes, "European Social Anthropology in 2018: An Increasingly Recursive Public," *Social Anthropology*, 2019, <https://doi.org/10.1111/1469-8676.12625>.

¹¹ O. Woods L. Kong, "Disjunctures of Belonging and Belief: Christian Migrants and the Bordering of Identity in Singapore" 26, no. 6 (2019).

masyarakat, tumpang tindih antara praktik, dan (kembali) negosiasi identitas. Studi Gorina¹² mengkaji bagaimana akhirnya, etnis juga bisa menjadi dimensi penting dari perilaku migrasi, terutama di masyarakat multietnis seperti yang ada di Asia tengah, di mana kelompok etnis mayoritas mungkin berbeda dari etnis minoritas dalam hal budaya dan risiko demografis, ekonomi, dan politik.

Studi menarik Martiniello¹³ mengeksplorasi bagaimana migran dan musik etnis minoritas berubah dan memperkaya budaya lokal (khususnya budaya anak muda) melalui proses seperti *cultural metissage*, fusi (penggabungan) dan *invention*. Perubahan tuan rumah warga negara atau migran sebagai sebuah hasil kontak di antara mereka disebut akulturasi. Kemudian ia menambahkan bahwa contoh-contoh ini menunjukkan

¹² M Gorina, "ACTION LINES OF THE OUT-OF-FAMILY CARE SUPPORT CENTER FOR SUPPORTING FOSTER FAMILIES Gorina M SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION," in *Proceedings of the International Scientific Conference*, 2019, 209, <https://doi.org/DOI:10.17770/sie2019vol3.3927>.

¹³ Marco Martiniello, "4. Political Participation, Mobilisation and Representation of Immigrants and Their Offspring in Europe," in *Migration and Citizenship*, 2018, <https://doi.org/10.1515/9789048504268-007>.

bahwa disposisi pribadi warga negara dalam hal keterbukaan terhadap budaya lain mungkin memainkan peran penting dalam membentuk persepsi mereka tentang layanan pemerintah. Berry¹⁴ menyatakan argumen yang sama bahwa studi akulturasi telah mencoba untuk bergulat dengan pola penyesuaian imigran dengan ketergantungan pada kedekatan mereka dengan apa yang disebut budaya tuan rumah versus rumah. Bahwasanya setiap imigran memiliki cara adaptasi sendiri dengan budaya orang lokal untuk bisa diterima dan berinteraksi sosial.

Kearifan lokal memiliki peranan dalam mengakomodasi resolusi konflik terkait masyarakat setempat. Kearifan lokal sebagai sumber daya pengetahuan dinamis yang dimiliki, dikembangkan dan ditransmisikan populasi tertentu dan diintegrasikan dengan pemahaman mereka tentang alam dan lingkungan budaya yang bertujuan untuk menjaga harmonisasi hubungan manusia dengan alam, lingkungan, dan budayanya sendiri. Kemudian, konsepsi terkait kearifan lokal

¹⁴ John W. Berry, "Acculturation: Living Successfully in Two Cultures," *International Journal of Intercultural Relations*, 2005, <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2005.07.013>.

mengandung pandangan atau aturan sehingga lebih banyak orang memiliki pijakan dalam menentukan suatu tindakan seperti perilaku orang sehari-hari. Konsepsi-konsepsi itu, kemudian membentuk kearifan lokal sebagai warisan budaya yang menjaga keselarasan hidup manusia. Ramirez¹⁵ mengatakan bahwa hakikatnya, kearifan lokal memang menjadi landasan bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dan sebagai pedoman mereka dalam berperilaku sosial. Ini dapat digunakan sebagai tanggapan terhadap tantangan yang luar biasa, atau untuk memberikan pengetahuan khusus tentang masa depan, atau bahkan semacam refleksi pada beberapa aspek kesulitan manusia termasuk pengetahuan itu sendiri.

Conflict Transformation: Budaya sebagai Resolusi Konflik

Menurut Cohen,¹⁶ resolusi konflik merupakan "*a basic human activity articulated and conducted in*

¹⁵ Carlos R. Ramirez, "Ethnobotany and the Loss of Traditional Knowledge in the 21st Century," *Ethnobotany Research and Applications*, 2007, <https://doi.org/10.17348/era.5.0.245-247>.

¹⁶ Raymond Cohen, "Language and Conflict Resolution: The Limits of English," *International Studies Review*, 2001, <https://doi.org/10.1111/1521-9488.00224>.

forms that significantly vary across cultures". Sejalan dengan itu, Fincham dkk.¹⁷ memaparkan resolusi konflik sebagai "*integral to a successful relationship, and it is likely that resentment engendered by partner transgressions may fuel couple conflict and impede successful conflict resolution*". Resolusi konflik perlu melibatkan proses sosialisasi yang berfokus pada perilaku.¹⁸ Ada tiga prinsip resolusi konflik yakni kemampuan berkelanjutan, efektivitas, dan adaptasi.¹⁹ Sementara itu, dalam konsep tradisional Hindu, resolusi konflik bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang kooperatif, harmonis, dan sebagian besar bebas dari konflik berdasarkan nilai-nilai dan institusi yang sesuai.²⁰ Namun,

¹⁷ Frank D. Fincham, Steven R.H. Beach, and Joanne Davila, "*Longitudinal Relations Between Forgiveness and Conflict Resolution in Marriage*," *Journal of Family Psychology*, 2007, <https://doi.org/10.1037/0893-3200.21.3.542>.

¹⁸ Maaike Kempes, "*Natural Conflict Resolution in Humans*," *Behaviour*, 2008, <https://doi.org/10.1163/156853908786131298>.

¹⁹ X Zhenglei, M Zongwen, and L Jiyuan, "*Conflicts in Land Use in Marine Protected Areas: The Case of the Yellow River Delta, China.*," *Journal of Coastal Research* 30, no. 6 (2014): 1314.

²⁰ Mohan S Kashikar, "*Hindu Way of Conflict Resolution*," *The Indian Journal of Political Science*, 2011.

di dunia sekarang ini, bentuk resolusi konflik terlalu sering diganti dengan legalitas yang berorientasi pada proses.²¹ Resolusi konflik ini tidak selalu merupakan cara penyelesaian yang dipilih lingkungan, penggunaan lahan, atau alami masalah sumber daya. Beberapa pihak yang terlibat dalam perselisihan dapat menggunakan negosiasi dan mediasi pihak ketiga. Namun, mediasi memiliki kegunaan terbatas dalam memberikan perdamaian dan rekonsiliasi perdamaian yang tahan lama—terutama dalam konflik berkepanjangan.²² Keterhambatan resolusi konflik lebih disebabkan masalah komunikasi. Resolusi konflik tidak mungkin bekerja ketika satu pihak merasa dapat memenangkan hukum, politik, atau hubungan masyarakat sehingga tidak memiliki alasan untuk berkompromi.²³

Di Arizona, perselisihan antarberbagai pihak terkait

²¹ Floyd Reed, David Bradford, and Justin McConkey, "*A Century of Managing Rangelands on National Forests*," *Rangelands*, 2005, [https://doi.org/10.2111/1551-501X\(2005\)27.3\[45:ACOMRO\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.2111/1551-501X(2005)27.3[45:ACOMRO]2.0.CO;2).

²² Boyka Stefanova, "*Regional Integration as a System of Conflict Resolution.*," *World Affairs*, 2006.

²³ Cohen, "*Language and Conflict Resolution: The Limits of English.*"

pembangunan kembali jalan yang rusak akibat badai dilakukan dengan melibatkan pengadilan Distrik Nevada. Hasilnya, semua pihak yang bersangkutan dilibatkan dalam proses negosiasi dan pembuatan administrasi serta dibantu dalam memilih mediator. Di India, promosi visi dan pemahaman alternatif tentang Islam yang lebih akomodatif terhadap orang-orang dari agama lain dan penekanan cara damai penyelesaian konflik ialah syarat yang penting dan perlu—meskipun tidak cukup—syarat untuk penyelesaian damai konflik Kashmir.²⁴ Sementara itu, di Kanada, sejarah resolusi konflik adalah produk yang disengaja dari kebijakan luar negeri Inggris—bukan konsekuensi yang tidak disengaja dari dekolonisasi yang ceroboh.²⁵ Sedangkan, di *Marine Protected Areas* (MPAs) di China, resolusi konflik terkendala karena adanya konflik kepentingan antara perlindungan lahan basah dan eksploitasi ladang minyak seperti konflik penggunaan lahan, konflik manajemen, dan konflik

lingkungan²⁶. Konflik antara Cina-India terutama konflik perbatasan di Arunachal Pradesh diselesaikan melalui diplomasi untuk membahas dan menjabarkan prinsip yang mana garis klarifikasi *Line of Actual Control* harus tetap menjadi titik awal untuk setiap negosiasi tersebut.²⁷

Konflik dengan segala problematika yang mengiringinya menjadikan alasan studi ini dilakukan. Pendekatan resolusi konflik juga sudah banyak dilakukan, tetapi seringkali meninggalkan jejak yang tidak di tengah masyarakat yang sedang berkonflik. Hal inilah yang menjadi latar belakang studi ini dilakukan dalam rangka menambah gambaran dinamika resolusi konflik dengan pendekatan *local wisdom* atau dalam studi ini diistilahkan akomodasi kultural. Tulisan ini merupakan hasil penelusuran kasus konflik dalam studi sebelumnya atau penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan akomodasi kultural yang direpresentasikan dengan *local wisdom* dalam

²⁴ Yoginder Sikand, "Civil Society Initiatives and Peace: Religion and Religious Activists," *Economic and Political Weekly*, 2004.

²⁵ Jason Kaufman, "Et Tu, Professor Wimmer?," *Sociological Forum*, 2007, <https://doi.org/10.1111/j.1573-7861.2007.00041.x>.

²⁶ Zhenglei, Zongwen, and Jiyuan, "Conflicts in Land Use in Marine Protected Areas: The Case of the Yellow River Delta, China.," 1314.

²⁷ B. L. Shah, "CONFLICT RESOLUTION IN INTERNATIONAL POLITICS: THE INDO-CHINA CROSS BORDER DISPUTE IN ARUNACHAL PRADESH," 2010.

penanganan kasus konflik atas nama agama di Indonesia. Penelusuran data melalui observasi dan pemetaan kasus konflik di Indonesia dari dokumen yang sudah dipublikasikan. Studi ini menggunakan jenis *qualitative research*, karena data-data yang tersaji dikumpulkan dengan cara-cara dan strategi pengumpulan data yang lazim digunakan dalam pengumpulan data yang bersifat kualitatif deskriptif.

Bentuk Konflik Agama yang Sedang Berlangsung

Intensitas konflik yang terjadi selama ini telah mengkonstruksi dan sekaligus mendekonstruksi bangunan-bangunan nilai yang ada di dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan munculnya tatanan baru di dalam masyarakat pascakonflik, di mana bangunan tersebut merupakan paduan cara pandang dan berperilaku terhadap orang di sekitarnya. Bangunan ini tidak dapat dipisahkan dari bangunan sebelumnya yang ditransformasikan ke dalam wujud baru namun masih merujuk pada kenyataan sebelumnya. Berdasarkan pengamatan terhadap beberapa kasus konflik yang pernah terjadi, ada beberapa hal yang menarik dan perlu dipertimbangkan terkait dengan bentuk konflik atas nama agama. Perselisihan atas nama

agama sering terjadi di tengah komunitas beragama. Dari penelusuran yang ditemukan dalam media online, secara umum peta konflik yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir cenderung memperlihatkan tiga bentuk yang menurut penulis patut diperhatikan.

Pertama, konflik komunal, perbedaan pandangan antara kelompok keagamaan sangat rentan melahirkan konflik yang melibatkan seluruh anggota dalam komunitas. Salah satu di antaranya adalah kasus konflik komunal yang pernah terjadi di Maluku antara tahun 1999-2000 sebagaimana ditunjukkan²⁸ bahwa konflik komunal bermula dari perselisihan antara pengemudi angkot, seorang Kristen Jacob Lauhery dengan Nursalim, Islam dari Batu Merah Bugis. Konflik kemudian berkembang menjadi konflik agama (Islam dan Kristen). Demikian pula konflik komunitas beragama mempertegas eksistensi konflik komunal yang ditunjukkan melalui bentrokan antara Ahmadiyah dan kelompok agama lain telah mendominasi konflik sosial di Indonesia sejak 2005 hingga 2011

²⁸ Jamin Safi, "Konflik Komunal: Maluku 1999-2000," *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 2017, <https://doi.org/10.21831/istoria.v13i1.17615>.

29. Kedua, konflik sektarian intra-agama menjadi pemicu dalam penyebarluasan konflik atas nama agama. Konflik ini tidak dapat dipisahkan dengan pemahaman keagamaan individu dan kelompok. Dalam masyarakat Muslim misalnya, konflik sektarian yang sering dimunculkan di permukaan adalah konflik Sunni-Syiah. Bentuk konflik sektarian ini bermula dari peristiwa perang Shiffin. Dari situlah kemudian muncul kelompok Sunni dan Syiah serta kelompok ekstrim Khawarij³⁰. Demikian pula konflik Polarisasi ini telah menyedot energi umat Islam sehingga melupakan agenda besar mereka untuk menjadi umat yang terbaik. Hal itu sejalan penelitian yang dilakukan Balai Litbang Agama Jakarta (BLAJ) Balitbang Diklat Kementerian Agama RI pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa terdapat 12 kasus konflik sektarian.

²⁹ Bakhtiar Hasan and Ayub Mursalin, “Konflik Komunal Mengatasnamakan Agama di Indonesia: Analisis Terhadap Konflik Ahmadiyah dalam Pemberitaan Media, 2005-2011,” *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 2011. Lihat juga Ali Amin, *Intra-Religious Persecution in West Java: Case of Ahmadiyyah Community in Manis Lor*, MA Thesis, CRCS UGM, 2005.

³⁰ Abdul Hakim, “Konflik Sektarian dan Perkembangan Pemikiran dalam Islam,” *SAFINA Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2016.

Kasus konflik keagamaan berjenis sektarian yang terjadi adalah satu penolakan terhadap komunitas Ahmadiyah di Kecamatan Pebaruyang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lalu konflik dualisme kepemimpinan gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Anugerah di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Ketiga, konflik pendirian masjid komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kecamatan Tajur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Ketiga, konflik agama yang diakibatkan eskalasi politik yang menguat karena kepentingan kelompok atau partai tertentu dalam pemenuhan target kekuasaan. Agama dijadikan sebagai alat yang sangat potensial dalam pemenuhan kepentingan dan kekuasaan yang berakibat pada lunturnya rasa kemanusiaan atas nama perbedaan pandangan secara politis. Terdapat banyak kasus politisasi agama sepanjang tahun politik berlangsung antara tahun 2017 hingga 2019, dengan menunjukkan maraknya kampanye negatif (*negative campaign*) dan kampanye hitam (*black campaign*) tidak bisa dihindari menjelang pemilihan umum di Indonesia³¹.

³¹ Aisyah Dara Pamungkas and Ridwan Arifin, “Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis atas *Black Campaign* dan *Negative Campaign*),”

Dalam hal ini, agama merupakan sesuatu yang sakral dan bersifat pribadi yang menjadikan hal ini mudah untuk menciptakan politisasi agama di ruang publik.³² Politisasi agama telah dikonstruksi sebagai politik hitam yang memanipulasi pemahaman dan pengetahuan seseorang mengenai agama dengan cara propaganda yang bermaksud untuk mempengaruhi agama/kepercayaan dalam upayanya memasukan kepentingan ke dalam sebuah agenda politik yang mengancam kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.³³

DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 2019, <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.64>
1. Lihat juga Ali Amin, *Alumni Pesantren Gontor dan Jaringan Islam Global*, *Jurnal of Islamic Education Policy*. JIEP. 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/j.v3i2.862>.

³² Siti Faridah and Jerico Mathias, "Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa dalam Pemilu," *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2018; Budi Kurniawan, "Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia," *Jurnal Sosiologi Agama -*, 2018; Mohammad Supriyadi, "Politisasi Agama di Ruang Publik: Komunikasi SARA dalam Perdebatan Rational Choice Theory," *Jurnal Keamanan Nasional*, 2015; Mohammad Shofan, *Politisasi Agama di Ruang Publik: Ideologis atau Politis?*, *MAARIF Journal*, 2018.

³³ Faridah and Mathias, "Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa dalam Pemilu."

Lahirnya Konflik Agama

Keragaman budaya, agama dan etnis dalam suatu masyarakat tidak dapat dihindari. Indonesia merupakan negara yang memiliki latar belakang keragaman budaya yang tersebar dalam belasan ribu pulau di Nusantara. Indonesia adalah negara dengan komposisi suku yang sangat beragam. Hasil penelitian kerja sama BPS dan ISEAS (*Institute of South Asian Studies*) merumuskan bahwa terdapat sekitar 633 suku yang diperoleh dari pengelompokan suku dan subsuku yang ada di Indonesia.³⁴ Ketidapkahaman atas realitas keragaman berakibat pada munculnya pandangan sempit dalam ruang kehidupan bersama. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman tentang keragaman untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya konflik horizontal atas nama perbedaan latar belakang budaya, etnis dan agama. Studi ini mendeskripsikan faktor penentu dalam terjadinya konflik atas nama agama di masyarakat menunjukkan pada tiga kecenderungan.

³⁴ Agus Joko Pitoyo and Hari Triwahyudi, "Dinamika Perkembangan Etnis di Indonesia dalam Konteks Persatuan Negara," *Populasi*, 2018, <https://doi.org/10.22146/jp.32416>.

Pertama, minimnya pemahaman mengenai keberagaman yang merupakan keniscayaan yang tidak bisa dilihat dengan perspektif yang terbatas. Demikian pula faktor geografis wilayah Indonesia yang merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia yang menganut paham *bhineka tunggal ika*. Kenyataan ini dapat dilihat dari sosio-kultural dan geografisnya yang meliputi agama, ras, suku, budaya, dan lainnya³⁵. Keragaman budaya dengan berbagai karakter ini juga ternyata menjadi ancaman perpecahan yang disebabkan kurangnya kesadaran tentang makna keberagaman ini. Di samping diyakini juga sebagai modal budaya, gesekan-gesekan yang berbau sara terus terjadi karena kurangnya kesadaran budaya masyarakatnya.³⁶

Kedua, sikap eksklusif menjadi salah satu akibat yang

³⁵ Amin Maulani, "Transformasi Learning Dalam Pendidikan Multikultural Keberagaman," *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2013, <https://doi.org/10.21831/jppfa.v1i1.1049>; Julita Widya Dwintari, "Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural Dalam Pembinaan Keberagaman Masyarakat Indonesia," *Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya*, 2018.

³⁶ Sri Ambarwangi, "Multicultural Education in Schools Through Tradition Art Education," *HARMONIA - Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni*, 2013.

melahirkan konflik atas nama agama. Eksklusivisme dalam beragama merupakan karakteristik dari kebanyakan umat beragama yang berpandangan bahwa kebenaran dan keselamatan hanya ada di dalam agamanya sendiri³⁷. Eksklusivisme adalah bentuk hubungan sosial yang menghususkan atau mengeksklusifkan kelompok atau golongan tertentu. Beberapa kelompok diketahui adalah kelompok yang sangat eksklusif sehingga kelompok tersebut orang lain tidak mudah memasuki kelompok lain. Demikian pula, beberapa kelompok tersebut sering melakukan penindasan sehingga menyebabkan timbulnya sikap agresif dan diskriminatif atas kelompok yang tidak sejalan pemikiran. Biasanya manusia sebagai makhluk sosial lebih cenderung membentuk kelompok-kelompok tertentu. Tujuan manusia membentuk kelompok yaitu sebagai wadah dalam mewujudkan interaksi sosial dan demi membantu seseorang yang satu dengan yang lainnya. Hal-hal inilah sebenarnya telah terjadi sejak jaman dahulu kala. Beberapa kasus konflik akibat eksklusivisme di antaranya; konflik nonpribumi versus pribumi, konflik bernuansa agama, khususnya antara

³⁷ Nasitotul Janah, *Jurnal Tarbiyatuna., Tarbiyatuna*, 2016.

penganut agama Islam dan agama Kristen³⁸.

Ketiga, fanatisme pada suatu ajaran agama telah mengakibatkan sikap kebencian terhadap kelompok lain. Fanatisme agama adalah fenomena yang telah dipraktikkan dalam masyarakat Muslim sejak lama. Fanatisme agama dianggap sebagai faktor utama yang menyebabkan timbul dan berkembangnya konflik sosial dalam masyarakat Muslim³⁹. Dalam beragama tidak ada larangan dan memegang teguh keimanan dan kepercayaan atas suatu ajaran agama, tetapi jangan sampai terjebak pada dogmatisme agama yang cenderung merendahkan, bahkan menyalahkan ajaran agama yang berbeda. Dalam pandangan Supelli sikap dogmatis inilah yang melahirkan fanatisme dan ekstrimisme yang pada gilirannya akan memunculkan tindakan kekerasan dan kebrutalan, baik atas nama agama maupun ilmu pengetahuan. Dalam rangka meminimalisir sikap fanatisme

dalam suatu masyarakat menurut Hanafi diperlukan revitalisasi nilai-nilai agama melalui dialog, pendidikan pluralisme, mediasi, penegakan hukum, dan pembinaan akhlak. Dengan demikian sikap fanatisme dapat diminimalisir sejak dini.

Keempat, primordialisme yang mementingkan kelompok, suku, etnis dan ras tidak bisa dipisahkan dengan kasus-kasus konflik yang terjadi. Sikap primordialisme merupakan ikatan ikatan seseorang dalam kehidupan sosial yang sangat berpegang teguh terhadap hal-hal yang dibawa sejak lahir baik berupa suku bangsa, kepercayaan, ras, adat-istiadat, daerah kelahiran, dan lain sebagainya.⁴⁰

Primordialisme cenderung memperlihatkan komitmen masyarakat yang sangat menjunjung tinggi ikatan sosial yang berupa nilai-nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, tradisi, dan kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun. Sikap primordialisme sangat mempengaruhi pola perilaku

³⁸ Muhammad Saleh Tajuddin, Mohd. Azizuddin Mohd. Sani, and Andi Tenri Yeyeng, *Berbagai Kasus Konflik di Indonesia: Dari Isu Non Pribumi, Isu Agama, Hingga Isu Kesukuan*, Sulesana, 2016.

³⁹ Mohamad Kamil Hj Ab Majid, *Fanatik dan Taksud dalam Islam: Analisis Pandangan Al-Qaradawi*, Jurnal Usuluddin, 2003.

⁴⁰ Prayitno, *Pengaruh Sikap Primordialisme Terhadap Upaya Pembentukan Proses Harmonisasi Masyarakat Multikultur*, Foreign Affairs, 2017, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

seorang individu dalam hubungan sosial. Primordialisme dapat menyebabkan seseorang menjunjung tinggi hasil dari kebudayaannya dan memiliki rasa kesetiaan yang sangat tinggi pula. Apabila seseorang tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan masyarakat yang multikultural, maka sikap primordialisme akan dapat memicu konflik sosial yang tentunya berakhir pada perpecahan. Demikian pula di antara elit masyarakat baik itu elit intelektual maupun elit kekuasaan telah terjebak dalam arus primordialisme yang berakibat tantangan kesatuan dan persatuan bangsa.⁴¹ Kelima, faktor tokoh/aktor agama. Organisasi keagamaan yang sektarian biasanya sangat hierarkis dalam praktik kepemimpinan. Dalam komunitas keagamaan selalu ada satu sosok imam atau pimpinan yang diagungkan. Dalam hal ini, pimpinan komunitas tersebut seolah selalu benar perkataan dan tindakannya. Hal ini tentunya dapat memicu munculnya gerakan sosial yang dipimpin tokoh agama

⁴¹ Sukamto, "Nasionalisme, Wawasan Kebangsaan, dan Integrasi Bangsa dalam Pengembangan PIPS," *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial*, 2017; Syafuan Rozi, "Nasionalisme, Demokratisasi, dan Sentimen Primordialisme di Indonesia: Problematika Identitas Keetnisan versus Keindonesiaan pada Studi Kasus Aceh, Papua, Bali Dan Riau," *Jurnal Penelitian Politik*, 2009.

sebagaimana diperlihatkan pada aksi bela Islam 212 yang rentan menciptakan konflik di ruang publik.⁴² Demikian pula, semua instruksi yang bersumber dari pimpinan yang bersifat politik, ekonomi, maupun sosial wajib ditaati oleh seluruh pengikut tanpa pengecualian. Dalam Islam misalnya ada kyai sebagai aktor penggerak komunitas keagamaan dalam pengembangan pendidikan pesantren.⁴³ Kyai juga memiliki peran penting dalam penentuan perilaku sosial sikap politik individu

⁴² Muzayyin Ahyar and Alfitri Alfitri, "Aksi Bela Islam: Islamic Clicktivism and the New Authority of Religious Propaganda in the Millennial Age in Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 2019, <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.1-29>; Moch Nur Ichwan, "MUI, Gerakan Islamis dan Umat Mengambang," *Ma'arif*, 2016.

⁴³ Fifi Nofiaturrahmah, "Melacak Peran Kyai-Santri Dalam Politik Kebangsaan di Indonesia," *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 2014; Hasanatul Jannah, "Kyai, Perubahan Sosial dan Dinamika Politik Kekuasaan," *Fikrah - Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 2016, <https://doi.org/10.21043/fikrah.v3i1.1831>; Nur Lailatul Fitri, "Transisi Demokrasi dan Mobilitas Vertikal Kyai: Potret Peran Kyai Sebagai Governing Elite," *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 2018. Lihat juga Ali Amin, "Deradikalisasi Berbasis Pesantren: Kasus Pesantren Arroyaan Bogor," *Jurnal Harmoni*, Vol 11, tahun 2012.

dan kelompok.⁴⁴ Demikian pula peran ulama sangat penting dalam pencegahan dan penyelesaian konflik sosial keagamaan serta menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bersama.⁴⁵ Hal yang sama juga dipraktikkan tokoh agama yang lain misalnya, Kristen, Hindu dan Budha di mana potensi konflik dapat dipicu oleh aktor agama sekaligus tokoh agama mampu menjadi peredam konflik yang sedang berlangsung.

Akomodasi Kultural Sebagai Alternatif Resolusi Konflik Atas Nama Agama

Setiap daerah pada dasarnya memiliki potensi kultural yang dikenal dengan *local wisdom* perlu diakomodasi untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik di masyarakat. Dapat disebutkan,

⁴⁴ Hasanah, 2013; Jannah, 2016; Wafa, 2012.

⁴⁵ M Khoiril Anwar, "Peran Ulama di Nusantara dalam Mewujudkan Harmonisasi Umat Beragama," *FIKRAH*, 2016, <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1621>; Muhammad Zainal Abidin, "ULAMA IN INDONESIAN URBAN SOCIETY: A View of Their Role and Position in the Change of Age," *Jurnal THEOLOGIA*, 2018, <https://doi.org/10.21580/teo.2017.28.2.1863>; Ahdi Makmur, "Peran Ulama dalam Membina Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2012, <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.114>.

misalnya, hasil studi tentang Nosarara Nosabatutu yang merupakan kearifan lokal di Sigi, kearifan lokal dari masyarakat Sasak dan Mbajo, dan yang ada pada masyarakat Kepulauan Kangean bahwa masyarakat pada dasarnya memiliki perintah hukum untuk menyelesaikan konflik dan perselisihan.⁴⁶ Selanjutnya, disebutkan bahwa bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa adalah dengan menggunakan model Hakim Partikular, jalur mediasi, dan *Settlement Conference*. Mekanisme yang dilakukan melalui proses *rembugan*, penggunaan mediator, pelebagaan penyelesaian sengketa dan eksekusi hasil putusan.

Hasanah dan Rohaniawati menyatakan bahwa semua kearifan ini dapat diklasifikasikan menjadi dua inti kearifan lokal, tujuan pertama kemakmuran atau kesejahteraan, dan tujuan kedua adalah perdamaian atau kebaikan.⁴⁷

⁴⁶ Muhammad Taufiq et al., "Mediasi sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas dalam Penyelesaian Perkara Pidana," *Jurnal Media Hukum*, 2017, <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0089.137-146>.

⁴⁷ Aan Hasanah, Neng Gustini, and Dede Rohaniawati, "CULTIVATING CHARACTER EDUCATION BASED ON SUNDANESE CULTURE LOCAL WISDOM," *Jurnal Pendidikan Islam*, 2016, <https://doi.org/10.15575/jpi.v2i2.788>.

Di samping itu, kearifan lokal yang diimplementasikan dalam komitmen, pemikiran positif, kesopanan, kejujuran, solidaritas sosial, harmoni, dan resolusi konflik, dan syukur dapat digolongkan ke dalam kearifan lokal yang bertujuan untuk membangun perdamaian dengan kepribadian masyarakat yang baik. Konflik itu sendiri memiliki karakter yang berbeda di setiap masyarakat multikultural. Ada banyak minat yang berbeda, etnis, suku, bahasa, agama, dan yang berbeda budaya. Benar-benar masyarakat yang penuh warna di sini. Di sisi lain, perbedaan itu juga memiliki banyak potensi. Masyarakat setempat, di setiap kelompok masyarakat, memiliki kebijaksanaan sendiri untuk bertahan dalam situasi kekacauan.

Karakteristik Konflik

Fakta konflik yang terjadi di Indonesia telah menjadi isu yang krusial di mana Indonesia dilihat sebagai negara yang memiliki keragaman etnis dan budaya. Kita hidup di dunia yang terpolarisasi agama, kebangsaan, ideologi politik, ras, etnis, jenis kelamin, kelas sosial, dan banyak lagi pembagian yang terlalu banyak untuk disebutkan. Tidak jarang keragaman dan ketidakcocokan menyebabkan konflik. Konflik seringkali didefinisikan sebagai proses interaktif yang dimanifestasikan

dalam ketidakcocokan, ketidaksepakatan, atau perbedaan di dalam atau di antara entitas sosial. Konflik, terutama yang melibatkan nilai-nilai atau hubungan mendasar, misalnya, sering dihipotesiskan bersifat destruktif; konflik emosional yang kuat dianggap tak terelakkan.⁴⁸ Konflik ini terjadi pada kelompok primer dan sekunder, dari keluarga hingga masyarakat, sistem perilaku relasional yang terhambat dan destruktif, tergantung pada disfungsi sistem sosial yang mewakili konteks. Dalam teori identitas sosial, kelompok dapat masuk ke dalam konflik karena berbagai alasan, dan konflik juga merupakan hasil dari cara yang ada orang mengidentifikasi satu sama lain.

Konflik yang marak terjadi di Indonesia ditengarai selalu melibatkan unsur agama. Beberapa tahun lalu masyarakat Indonesia dihebohkan dengan munculnya kasus Ahmadiyah. Pro-Ahmadiyah memahami bahwa pelarangan aktivitas Ahmadiyah di ruang publik bertentangan dengan konstitusi

⁴⁸ Dean Tjosvold, "Defining Conflict and Making Choices about Its Management: Lighting the Dark Side of Organizational Life," *International Journal of Conflict Management*, 2006, <https://doi.org/10.1108/10444060610736585>.

nasional yang menjamin kebebasan beragama. Di sisi lain, anti-Ahmadiyah bersikap bahwa kehadiran Ahmadiyah telah menodai Islam dan menciptakan ketidaknyamanan bagi umat Islam. Di sini diperlukan tindakan nyata, seperti dialog, misalnya, yang dapat diprakarsai oleh liberalis atau pluralis dengan kaum konservatif dan pemerintah untuk mencari solusi, setidaknya mengesampingkan Ahmadiyah dari pelaku kekerasan. Menggunakan perspektif fungsi kebijakan publik untuk memberikan tatanan sosial, diberlakukannya Keputusan Ahmadiyah adalah upaya pemerintah untuk melindungi keberadaan Ahmadiyah dengan melarang kegiatan mereka di tempat umum karena potensi bahaya bagi keselamatan mereka.⁴⁹ Kasus konflik paling keras terjadi di Indonesia ketika kebijakan terhadap etnis Cina memiliki variasi dari waktu ke waktu tergantung pada keadaan hubungan antara pribumi Indonesia dan penduduk keturunan Cina. Oleh karena itu, dialog antarbudaya memiliki peran penting dalam hal ini. Itu memungkinkan kita untuk mencegah perpecahan etnis, agama, bahasa, dan budaya.

⁴⁹ Heni Ismiati Ari Ganjar Herdiansah, Junaidi, *“Pembelahan Ideologi, Kontestasi Pemilu, dan Persepsi Ancaman Keamanan Nasional: Spektrum Politik Indonesia Pasca 2014?”*, *Jurnal Wacana Politik*, 2017.

Faktor Keberlangsungan Konflik

Selain menjadi kekayaan bangsa, keberagaman kultural juga bisa menjadi ancaman bagi masyarakat. Istilah lain yang masih berhubungan adalah *social diversity*, digambarkan sebagai mengakui perbedaan perspektif budaya dalam komunitas. Keberagaman ini membutuhkan perhatian kita karena sulit untuk berbicara tentang menghargai perbedaan. Perbedaan seringkali membuat konflik, apalagi bila tidak ada ruang-ruang dialog di antara mereka. Sudah banyak literatur yang membahas bagaimana pengaruh keberagaman kultural ini dalam menciptakan konflik.⁵⁰

Setidaknya dapat dijelaskan bahwa konflik dilatarbelakangi banyak hal. Disebutkan bahwa konflik terjadi ketika entitas sosial (a) diperlukan untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau minatnya, (b) memiliki preferensi perilaku, kepuasan yang tidak sesuai dengan implementasi orang lain terhadap pilihannya, (c) menginginkan sumber daya yang saling diinginkan dan kekurangan pasokan, sehingga keinginan semua orang mungkin tidak terpenuhi sepenuhnya, dan (d)

⁵⁰ Alvin P. Cohen and Arthur P. Wolf, *“Religion and Ritual in Chinese Society,”* *Journal of the American Oriental Society*, 1978, <https://doi.org/10.2307/599787>.

memiliki sikap, nilai, keterampilan, dan tujuan yang dapat mengarahkan seseorang memiliki perilaku yang baik, tetapi yang dianggap eksklusif dari sikap, nilai-nilai, keterampilan, dan tujuan yang dipegang oleh pihak lain. Konflik juga terjadi ketika dua atau lebih sosial entitas (e) memiliki preferensi perilaku sebagian eksklusif tentang gabungan tindakan mereka, dan (f) saling tergantung dalam kinerja fungsi mereka atau kegiatan. Konflik kelompok selanjutnya, dilihat terdiri atas dua bagian, satu bagian dengan proses objektif, seperti persaingan antara anggota individu kelompok yang berbeda, perubahan posisi kelompok dalam masyarakat, dan bagian lain dengan perasaan subjektif ancaman yang ditimbulkan oleh anggota *outgroup* terhadap individu dan minat kelompok.⁵¹

Purworini dan Santoso⁵² mengatakan bahwa konflik terjadi karena kurangnya keinginan yang kuat dari pihak-pihak yang berkonflik dalam menyelesaikan

⁵¹ Francis B. Nyamnjoh and David I. Kertzer, "Ritual, Politics, and Power," *Political Psychology*, 1989, <https://doi.org/10.2307/3791340>.

⁵² Dian Purworini and Budi Santoso, "Sensemaking Theory in Portraying an Organizational Conflict: A Case Study Analysis," *Humanities and Social Sciences Reviews*, 2019, <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7336>.

konflik segera. Akibatnya, konflik berkepanjangan bahkan menyebabkan munculnya konflik baru. Salah satu akibat konflik adalah kekerasan. Kekerasan sering dimulai sebagai konflik komunal (kerusuhan, pogrom, serangan geng), tetapi meningkat ke tingkat perang saudara jika negara tidak campur tangan. Bahkan, ia mempertimbangkan banyak jenis konflik manusia. Dalam ulasan tersebut, termasuk konflik interpersonal seperti kekerasan dalam rumah tangga, kemarahan di jalan, penyerangan, pembunuhan, dan pemerkosaan dan konflik antarkelompok termasuk kerusuhan, kekerasan etnis, invasi tanah, kekerasan geng, perang saudara dan bentuk-bentuk ketidakstabilan politik lainnya, seperti kudeta. Selain sisi negatif, konflik juga menghadirkan sisi positif, tetapi konflik antara kelompok-kelompok sosial menunjukkan bahwa kepercayaan dan kerja sama dapat dikaitkan dengan konflik juga, seperti ketika kepercayaan khusus kelompok etnis beroperasi bersama dengan konflik antara kelompok etnis yang berbeda.⁵³

⁵³ Ade Yamin et al., "Being Minority in Papua: Religious and Political Identity Struggle of the Dani Muslims," *Al-Albab*, 2019, <https://doi.org/10.24260/alalbab.v8i1.1362>.

Akomodasi Kultural Dalam Penyelesaian Konflik

Kearifan lokal sebagai pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang memanifestasikan kegiatan yang diambil masyarakat setempat dalam menyelesaikan berbagai masalah mengenai kebutuhan mereka. kearifan lokal menyangkut toleransi dan prinsip persaudaraan yang melahirkan harmonisasi keanekaragaman. Kemunculan konflik sebagai bagian dari keretakan hubungan harmonis dalam masyarakat banyak disebabkan oleh permasalahan tanah atau tradisi adat. Konflik tidak hanya meliputi masalah agama dan etnis. Keharmonisan dengan demikian dapat tercapai melalui penyelesaian konflik yang sangat dekat dengan budaya masyarakat dan selalu menjaga interaksi sehingga tidak ada kesenjangan di antara perbedaan-perbedaan yang ada.⁵⁴ Kearifan lokal dikaitkan dengan identitas sosial dan dijadikan pengetahuan lokal untuk digunakan dalam membangun negara. Selain itu, ia juga dimaksudkan untuk memastikan pembangunan nasional juga dilakukan melalui pendidikan

⁵⁴ Purworini and Santoso, "Sensemaking Theory in Portraying an Organizational Conflict: A Case Study Analysis."

nasional dengan memasukkan pelajaran budaya lokal di sekolah.⁵⁵

Dalam budaya di Akwa Ibom, Negara bagian di Nigeria menjadikan air sebagai simbol kedamaian dan cinta sesama manusia. Pada saat konflik, pihak-pihak yang disatukan melalui penggunaan air secara simbolis yang dicampur dengan tanah liat lokal (*ndom*) sebagai tanda pembuatan perdamaian yang abadi. Air menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam bentuk ritual damai selain itu air juga menjadi simbol yang menghubungkan yang hidup dengan dengan leluhur. Bahkan air dianggap sebagai rumah roh.⁵⁶ Sedangkan di Indonesia kearifan lokal ini dapat dijalankan sebagai mekanisme sosial budaya yang terkandung dalam tradisi masyarakat Indonesia yang terbukti lebih efektif dalam mengumpulkan persaudaraan dan solidaritas antara pemilik budaya yang telah melembagakan dan mengkristal dalam tatanan sosial dan budaya. Dalam budaya Manggarai, Lejong Tau, NTT di mana berdasarkan

⁵⁵ Hasanah, Gustini, and Rohaniawati, "CULTIVATING CHARACTER EDUCATION BASED ON SUNDANESE CULTURE LOCAL WISDOM."

⁵⁶ Emmanuel Akpabio, "Water Supply and Sanitation Practices in Nigeria: Applying Local Ecological Knowledge to Understand Complexity," ZEF Working Paper Series, 2012.

keadaan tersebut, budaya solidaritas antara sesama orang-orang dari Manggarai yang tinggal di perantauan telah lama ada. Mereka melestarikannya berdasarkan semangat lokal mereka dalam kehidupan sosial di perantauan, walau tetap saja mereka stereotip negatif tetap melekat pada mereka.⁵⁷

Kearifan lokal memiliki peranan dalam mengakomodasi resolusi konflik terkait masyarakat setempat. Kearifan lokal sebagai sumber daya pengetahuan dinamis yang dimiliki, dikembangkan dan ditransmisikan oleh populasi tertentu dan diintegrasikan dengan pemahaman mereka tentang alam dan lingkungan budaya. Pada hakikatnya, kearifan lokal menjadi landasan bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dan sebagai pedoman mereka dalam berperilaku sosial. Studi yang dilakukan Taufiq dan Widyaningsih⁵⁸ menunjukkan bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa adalah dengan menggunakan model Hakim Partikular, jalur mediasi, dan

Settlement Conference di mana mekanisme yang dilakukan melalui proses *rembugan*, penggunaan mediator, pelembagaan penyelesaian sengketa dan eksekusi hasil putusan. Studi yang lain mengenai resolusi konflik ditunjukkan Yamin dkk.⁵⁹ di mana dalam konteks masyarakat Papua secara adat penyelesaian konflik lebih berfokus pada komoditas dan memiliki nilai sosial yang tinggi dengan cara bertukar babi/komoditas lainnya dan juga dapat dilakukan dengan pernikahan sebagai tanda perdamaian dimana dari pernikahan ini dapat membentuk aliansi klan dan keluarga sehingga dapat memperkuat modal sosial mereka.

Kesimpulan

Indonesia dengan latar belakang etnis, suku, budaya, dan agama yang beragam memiliki potensi konflik yang besar. Keragaman tersebut selain sebagai faktor yang sering dijadikan sumber konflik, namun memiliki potensi besar pula dalam resolusi konflik sosial maupun agama. Temuan penting studi ini ditunjukkan pada tiga perspektif dalam melihat konflik atas nama agama. *Pertama*, konflik yang berlangsung di

⁵⁷ Kurniawan, "Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia."

⁵⁸ Taufiq et al., "Mediasi sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas dalam Penyelesaian Perkara Pidana."

⁵⁹ Yamin et al., "Being Minority in Papua: Religious and Political Identity Struggle of the Dani Muslims."

Indonesia cenderung diperlihatkan dalam tiga bentuk antara lain: konflik komunal, konflik sektarian dan konflik eskalasi politik. *Kedua*, faktor konflik agama dipicu oleh lima faktor antara lain; masih minimnya pemahaman akan realitas keragaman suku, etnis, dan agama di Indonesia. Demikian pula pemikiran dan sikap eksklusivisme, fanatisme terhadap ajaran agama, primordialisme yang mementingkan etnis maupun agama, dan peran tokoh agama sebagai penggerak komunitas atau kelompok. *Ketiga*, akomodasi kultural dengan melihat potensi kearifan lokal, mampu dijadikan perangkat dalam penyelesaian permasalahan konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan kata lain potensi budaya yang dimiliki oleh setiap wilayah dapat dijadikan rujukan dalam resolusi konflik.

Studi ini masih memiliki keterbatasan pada aspek data yang dijadikan sampel dalam skala kecil dengan pemetaan kasus konflik yang terdokumentasi pada studi sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan studi lanjutan dengan skala data yang lebih besar dengan penggunaan analisis yang lebih tajam dan komprehensif. Studi ini menyarankan bahwa, Indonesia dengan realitas keragaman tentunya tidak dapat terlepas dari konflik, namun keragaman tersebut dapat dijadikan sebagai perangkat yang

potensial untuk penyelesaian konflik. Oleh karena itu, perlu penggalian dan pensosialisasian semua pihak dalam memberdayakan potensi budaya lokal setiap wilayah. Dengan demikian, konflik sosial dan keagamaan dapat diminimalisir dampaknya secara luas, bahkan dapat dihindari sedini mungkin agar tidak mengakibatkan perpecahan sesama anak bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad Zainal. "Ulama in Indonesian Urban Society: A View of Their Role and Position in the Change of Age." *Jurnal THEOLOGIA*, 2018. <https://doi.org/10.21580/teo.2017.28.2.1863>.
- Ahyar, Muzayyin, and Alfitri Alfitri. "Aksi Bela Islam: Islamic Clicktivism and the New Authority of Religious Propaganda in the Millennial Age in Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 2019. <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.1-29>.
- Akpabio, Emmanuel. "Water Supply and Sanitation Practices in Nigeria: Applying Local Ecological Knowledge to Understand Complexity." *ZEF*

- Working Paper Series*, 2012.
- Ambarwangi, Sri. "Multicultural Education in Schools Through Tradition Art Education." *HARMONIA - Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni*, 2013.
- Amin, Ali. "Deradikalisasi Berbasis Pesantren: Kasus Pesantren Arroyaan Bogor." *Jurnal HARMONI*. Vol. 11, 2012.
- Amin, Ali. "Alumni Pesantren Gontor dan Jaringan Islam Global." *Jurnal Of Islamic Education Policy*.
<http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/jiep/article/view/862>
- Amin, Ali, dan Abdullah, Irwan. "Intra-Religious Persecution in West Java: Case study of Ahmadiyah Community in Manis Lor Kuningan," *Tesis MA*, CRCS UGM, 2015.
http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/27679.
- Anwar, M Khoiril. "Peran Ulama di Nusantara dalam Mewujudkan Harmonisasi Umat Beragama." *FIKRAH*, 2016.
<https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1621>.
- Ari Ganjar Herdiansah, Junaidi, Heni Ismiati. "Pembelahan Ideologi, Kontestasi Pemilu, dan Persepsi Ancaman Keamanan Nasional: Spektrum Politik Indonesia Pasca 2014?" *Jurnal Wacana Politik*, 2017.
- Aziza, Aulia. "Relasi Agama dan Budaya." *ALHADHARAH*, 2017.
<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v15i30.1204>.
- B. L. Shah. "CONFLICT RESOLUTION IN INTERNATIONAL POLITICS: THE INDO-CHINA CROSS BORDER DISPUTE IN ARUNACHAL PRADESH," 2010.
- Bakar, Abu. "Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama." *Toleransi*, 2015.
<https://doi.org/10.24014/trs.v7i2.1426>.
- Berry, John W. "Acculturation: Living Successfully in Two Cultures." *International Journal of Intercultural Relations*, 2005.
<https://doi.org/10.1016/j.ijintrrel.2005.07.013>.
- BM, St. Aisyah. "Konflik Sosial dalam Hubungan Antarumat Beragama." *Jurnal Dakwah Tabligh*, 2014.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdt.v15i2.348>.
- Cannella, Gaile S., and Mary Esther Soto Huerta. "Introduction: Becoming with Hybrid Bodies—Immigration, Public Policy, and the In-Between."

- Critical Methodologies* 19, no. 3 (2019): 147–151. <https://doi.org/doi:10.1177/1532708618817903>.
- Casram, Casram. “Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural.” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2016. <https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.588>.
- Cohen, Alvin P., and Arthur P. Wolf. “Religion and Ritual in Chinese Society.” *Journal of the American Oriental Society*, 1978. <https://doi.org/10.2307/599787>.
- Cohen, Raymond. “Language and Conflict Resolution: The Limits of English.” *International Studies Review*, 2001. <https://doi.org/10.1111/1521-9488.00224>.
- Dwintari, Julita Widya. “Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural dalam Pembinaan Keberagaman Masyarakat Indonesia.” *Jurnal Ilmu Pendidikan PKn Dan Sosial Budaya*, 2018.
- Faridah, Siti, and Jerico Mathias. “Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa dalam Pemilu.” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2018.
- Fauzi, Agus. “Agama, Pancasila dan Konflik Sosial di Indonesia.” *E-Journal Lentera Hukum*, 2017. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v4i2.5295>.
- Fincham, Frank D., Steven R.H. Beach, and Joanne Davila. “Longitudinal Relations Between Forgiveness and Conflict Resolution in Marriage.” *Journal of Family Psychology*, 2007. <https://doi.org/10.1037/0893-3200.21.3.542>.
- Fitri, Nur Lailatul. “Transisi Demokrasi dan Mobilitas Vertikal Kyai: Potret Peran Kyai sebagai Governing Elite.” *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 2018.
- Gorina, M. “ACTION LINES OF THE OUT-OF-FAMILY CARE SUPPORT CENTER FOR SUPPORTING FOSTER FAMILIES Gorina M SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION.” In *Proceedings of the International Scientific Conference*, 209, 2019. <https://doi.org/DOI:10.17770/sie2019vol3.3927>.
- Hakim, Abdul. “Konflik Sektarian dan Perkembangan Pemikiran dalam Islam.” *SAFINA Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2016.

- Hanafi, Imam. "Agama dalam Bayang-Bayang Fanatisme; Sebuah Upaya Mengelola Konflik Agama." *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 2018. <https://doi.org/10.24014/trs.v10i1.5720>.
- Hasan, Bakhtiar, and Ayub Mursalin. "Konflik Komunal Mengatasnamakan Agama di Indonesia: Analisis Terhadap Konflik Ahmadiyah dalam Pemberitaan Media, 2005-2011." *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 2011.
- Hasanah, Aan, Neng Gustini, and Dede Rohaniawati. "CULTIVATING CHARACTER EDUCATION BASED ON SUNDANESE CULTURE LOCAL WISDOM." *Jurnal Pendidikan Islam*, 2016. <https://doi.org/10.15575/jpi.v2i2.788>.
- Hasanah, Imrotul. "Peran Kiyai terhadap Pengambilan Keputusan Pemilih dalam Pemilukada Tahun 2013 di Kabupaten Pamekasan." *Jurnal Online Universitas Negeri Malang*, 2013.
- Hermawati, Rina, Caroline Paskarina, and Nunung Runiawati. "Toleransi Antarumat Beragama di Kota Bandung." *Indonesian Journal of Anthropology*, 2017. <https://doi.org/10.24198/umbara.v1i2.10341>.
- Hughes, Geoffrey. "European Social Anthropology in 2018: An Increasingly Recursive Public." *Social Anthropology*, 2019. <https://doi.org/10.1111/1469-8676.12625>.
- Ichwan, Moch Nur. "MUI, Gerakan Islamis dan Umat Mengambang." *Ma'arif*, 2016.
- Jamalie, Zulfa. "Pluralisme, Toleransi, Pendidikan Multikultural dan Kerukunan Umat Beragama." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 2012.
- Jamrah, Suryan A. "Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam." *Jurnal Ushuluddin*, 2015.
- Janah, Nasitotul. *Jurnal Tarbiyatuna. Tarbiyatuna*, 2016.
- Jannah, Hasanatul. "Kyai, Perubahan Sosial dan Dinamika Politik Kekuasaan." *Fikrah - Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 2016. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v3i1.1831>.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Kearifan Lokal sebagai Resolusi Konflik Keagamaan." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*,

2013.
<https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.2.251>.
- Kashikar, Mohan S. "Hindu Way of Conflict Resolution." *The Indian Journal of Political Science*, 2011.
- Kaufman, Jason. "Et Tu , Professor Wimmer? ." *Sociological Forum*, 2007.
<https://doi.org/10.1111/j.1573-7861.2007.00041.x>.
- Kempes, Maaike. "Natural Conflict Resolution in Humans." *Behaviour*, 2008.
<https://doi.org/10.1163/156853908786131298>.
- Khotimah, Khotimah. "Toleransi Beragama." *Jurnal Ushuluddin*, 2013.
<https://doi.org/10.24014/JUS.H.V20I2.928>.
- Kurniawan, Budi. "Politisasi Agama di Tahun Politik : Politik Pasca-Kebenaran Di Indonesia." *Jurnal Sosiologi Agama -*, 2018.
- L. Kong, O. Woods. "Disjunctures of Belonging and Belief: Christian Migrants and the Bordering of Identity in Singapore" 26, no. 6 (2019).
- Majid, Mohamad Kamil Hj Ab. "Fanatik Dan Taksub Dalam Islam: Analisis Pandangan Al-Qaradawi." *Jurnal Usuluddin*, 2003.
- Makmur, Ahdi. "Peranan Ulama dalam Membina Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2012.
<https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.114>.
- Martiniello, Marco. "4. Political Participation, Mobilisation and Representation of Immigrants and Their Offspring in Europe." In *Migration and Citizenship*, 2018.
<https://doi.org/10.1515/9789048504268-007>.
- Maulani, Amin. "Tranformasi Learning dalam Pendidikan Multikultural Keberagaman." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2013.
<https://doi.org/10.21831/jppfa.v1i1.1049>.
- Nofiaturrehman, Fifi. "Melacak Peran Kyai-Santri dalam Politik Kebangsaan di Indonesia." *Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 2014.
- Nyamnjoh, Francis B., and David I. Kertzer. "Ritual, Politics, and Power." *Political Psychology*, 1989.
<https://doi.org/10.2307/3791340>.
- Pamungkas, Aisyah Dara, and

- Ridwan Arifin. "Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis atas *Black Campaign dan Negative Campaign*)."
DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 2019.
<https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.641>.
- Pitoyo, Agus Joko, and Hari Triwahyudi. "Dinamika Perkembangan Etnis di Indonesia dalam Konteks Persatuan Negara."
Populasi, 2018.
<https://doi.org/10.22146/jp.32416>.
- Prayitno. "Pengaruh Sikap Primordialisme terhadap Upaya Pembentukan Proses Harmonisasi Masyarakat Multikultur."
Foreign Affairs, 2017.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Purworini, Dian, and Budi Santoso. "Sensemaking Theory in Portraying an Organizational Conflict: A Case Study Analysis."
Humanities and Social Sciences Reviews, 2019.
<https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7336>.
- Ramirez, Carlos R. "Ethnobotany and the Loss of Traditional Knowledge in the 21st Century."
Ethnobotany Research and Applications, 2007.
<https://doi.org/10.17348/era.5.0.245-247>.
- Reed, Floyd, David Bradford, and Justin McConkey. "A Century of Managing Rangelands on National Forests."
Rangelands, 2005.
[https://doi.org/10.2111/1551-501X\(2005\)27.3\[45:ACOMRO\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.2111/1551-501X(2005)27.3[45:ACOMRO]2.0.CO;2).
- Retnowati, Retnowati. "Agama, Konflik, dan Integrasi Sosial (Integrasi Sosial Pascakonflik, Situbondo)."
Analisa, 2014.
<https://doi.org/10.18784/analisa.v21i02.14>.
- Rozi, Syafuan. "Nasionalisme, Demokratisasi, dan Sentimen Primordialisme di Indonesia: Problematika Identitas Keetnisan versus Keindonesiaan pada Studi Kasus Aceh, Papua, Bali dan Riau."
Jurnal Penelitian Politik, 2009.
- Safi, Jamin. "Konflik Komunal: Maluku 1999-2000."
ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah, 2017.
<https://doi.org/10.21831/istoria.v13i1.17615>.
- Saleh Tajuddin, Muhammad, Mohd. Azizuddin Mohd. Sani, and Andi Tenri Yeyeng. "Berbagai Kasus

- Konflik di Indonesia: Dari Isu Non Pribumi, Isu Agama, Hingga Isu Kesukuan.” *Sulesana*, 2016.
- SETARA Institute. “Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran Tahun 2018,’ 2018,” 2018.
- Shofan, Mohammad. *Politisasi Agama di Ruang Publik: Ideologis Atau Politis? MAARIF Journal*, 2018.
- Sikand, Yoginder. “Civil Society Initiatives and Peace: Religion and Religious Activists.” *Economic and Political Weekly*, 2004.
- Stefanova, Boyka. “Regional Integration as a System of Conflict Resolution.” *World Affairs*, 2006.
- Sukamto. “Nasionalisme, Wawasan Kebangsaan, dan Integrasi Bangsa dalam Pengembangan PIPS.” *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial*, 2017.
- Supriyadi, Mohammad. “Politisasi Agama di Ruang Publik: Komunikasi SARA dalam Perdebatan Rational Choice Theory.” *Jurnal Keamanan Nasional*, 2015.
- Suryan, Suryan. “Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam.” *Jurnal Ushuluddin*, 2017. <https://doi.org/10.24014/jush.v23i2.1201>.
- Taufiq, Muhammad, Sarsiti, Rindha Widyaningsih, and Rani Hendriana. “Mediasi sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas dalam Penyelesaian Perkara Pidana.” *Jurnal Media Hukum*, 2017. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0089.137-146>.
- Tjosvold, Dean. “Defining Conflict and Making Choices about Its Management: Lighting the Dark Side of Organizational Life.” *International Journal of Conflict Management*, 2006. <https://doi.org/10.1108/1044-4060610736585>.
- Tule, Philipus. “Religious Conflicts and a Culture of Tolerance: Paving the Way for Reconciliation in Indonesia.” *Antropologi Indonesia*, 2014. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i63.3404>.
- Ulya, Inayatul. “Pendidikan Islam Multikultural sebagai Resolusi Konflik Agama di Indonesia.” *FIKRAH*, 2016. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1663>.
- Unwanullah, Arif. “Tranformasi Pendidikan untuk Mengatasi Konflik Masyarakat dalam

- Perspektif Multikultural.” *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2013. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v1i1.1050>.
- Wafa, M. Dhuha Aniqul. “Peran Politik Kyai di Kabupaten Rembang dalam Pemilu Tahun 1994-2009.” *Journal of Indonesian History*, 2012.
- Wedan, Mas. “Pengertian Pendidikan dan Tujuan Pendidikan secara Umum.” Silabus, 2016.
- Yamin, Ade, Irwan Abdullah, Achmad Nurmandi, Hasse Jubba, and Zuli Qodir. “Being Minority in Papua: Religious and Political Identity Struggle of the Dani Muslims.” *Al-Albab*, 2019. <https://doi.org/10.24260/alalbab.v8i1.1362>.
- Yunus, Firdaus M. “Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya.” *Substantia*, 2014.
- Zhenglei, X, M Zongwen, and L Jiyuan. “Conflicts in Land Use in Marine Protected Areas: The Case of the Yellow River Delta, China.” *Journal of Coastal Research* 30, no. 6 (2014): 1307–1214.